

REFORMASI ALIANSI PERTAHANAN AMERIKA SERIKAT-JEPANG-KOREA SELATAN MENGHADAPI ANCAMAN NUKLIR KOREA UTARA

Sony Iriawan
Program Studi Diplomasi Pertahanan
Universitas Pertahanan Indonesia
Komp. Indonesia Peace and Security Center, Sentul, Bogor
soni.irawan19@gmail.com

Abstrak

Fenomena mengenai uji coba senjata nuklir Korea Utara merupakan ancaman terhadap stabilitas keamanan. Dinamika terhadap isu tersebut menjadi semakin kompleks ketika China juga berkepentingan terhadap isu tersebut melalui kemitraan strategis dengan Korea Utara di berbagai bidang, seperti ekonomi, militer, dan energi. Strategi *proxy war* melalui keterlibatan China dalam pengembangan nuklir Korea Utara setidaknya telah berhasil menghadirkan ancaman bagi stabilitas hegemoni Amerika Serikat di kawasan. Dengan demikian, hal tersebut telah mendorong reformasi paradigma kerja sama pertahanan Amerika Serikat melalui mekanisme aliansi pertahanan trilateral bersama dengan Jepang dan Korea Selatan. Reformasi terhadap paradigma kerja sama pertahanan tersebut menuntut upaya komprehensif yang tidak hanya terfokus pada Korea Utara, tetapi juga berbagai bentuk faktor beserta lingkungan eksternal yang berkepentingan terhadap isu senjata nuklir Korea Utara.

Kata kunci: aliansi pertahanan, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, stabilitas hegemoni, senjata nuklir, Korea Utara

Abstract

The phenomenon of North Korea's nuclear weapons test poses a threat to security stability. The dynamics of the issue become more complex when China is also concerned about the issue through strategic partnership with North Korea in various fields such as economy, military, and energy. The proxy war strategy through China's involvement in North Korea's nuclear development has at least succeeded in posing a threat to the stability of United States hegemony in the region. That reality has encouraged the reform of the United States defense cooperation paradigm through the mechanism of a trilateral defense alliance with Japan and South Korea. The reform of the defense cooperation paradigm demands a concerted effort that not only focuses on North Korea, but also on the various factors and external environment that related to North Korea nuclear weapons issues.

Keywords: defense alliance, United States, Japan, South Korea, hegemonic stability, nuclear weapon, North Korea

Pendahuluan

Perang saudara yang melanda semenanjung Korea sejak 60 tahun yang lalu mengantarkan kedua negara Korea pada kondisi yang tidak mudah di era selanjutnya. Konflik yang berakhir dengan gencatan senjata tersebut tidak dapat seutuhnya menjamin terciptanya kondisi perdamaian yang menyeluruh dan berkesinambungan bagi Korea Selatan (Korsel) maupun Korea Utara (Korut) (Lee, 2005: 201). Sebagai warisan sejarah Perang Dingin, permusuhan yang eksis hingga hari ini telah menjadi ciri khas tersendiri dalam konstelasi politik internasional di kawasan Asia Pasifik. Perang terbuka seperti di era sebelumnya tidak lagi terjadi, namun hal tersebut telah tergantikan dengan fenomena terkini yang ternyata jauh lebih mengancam, yakni program pengembangan serta uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korut.

Berbagai upaya untuk melakukan denuklirisasi telah banyak dilakukan, namun hingga saat ini dunia masih menantikan formulasi yang tepat untuk menemukan strategi yang tepat guna menghindari ancaman senjata nuklir Korut. Stabilitas keamanan kawasan menjadi hal yang dipertaruhkan ketika dalam lebih dari satu dekade terakhir sejak 2006-2017 telah terjadi beberapa

uji coba senjata nuklir Korut. Di penghujung tahun 2016 lalu, Amerika Serikat (AS) telah mengambil langkah inisiatif untuk menekan China karena Beijing selama ini menjadi tumpuan diplomasi Pyongyang. Daniel Pinkston, pengamat Korea Utara dari *International Crisis Group* (ICG), di Seoul mengatakan perlunya mengambil sikap tegas, termasuk memberikan sanksi tegas kepada Korut, dan China bisa menjadi salah satu negara yang giat dalam melakukan hal ini (Padden, 2015). Joseph DeThomas, Duta Besar dan mantan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk isu non-proliferasi, mengatakan, tujuan diplomasi saat ini adalah bagaimana menghentikan tindakan provokatif Korut yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan kawasan dan geopolitik Asia Pasifik (Hardianto, 2016).

Berdasarkan kondisi tersebut, fenomena uji coba senjata nuklir Korut tentunya menempati perhatian khusus bagi kebijakan politik dan keamanan AS, di mana hal tersebut akan sangat mempengaruhi posisi AS sebagai negara hegemon. Adapun yang akan menjadi pembahasan utama terletak pada analisis tentang bagaimana AS menggunakan aliansi pertahanan bilateral dengan Jepang dan Korsel untuk menghadapi Korut. Faktor geopolitik juga menjadi

pertimbangan tersendiri bagi AS, di mana aliansi pertahanan bilateral dengan Jepang dan Korsel tetap dipercaya sebagai jaminan keamanan yang diberikan oleh AS. Terlebih selama ini Jepang dan Korsel menempati posisi penting bagi hegemoni AS di kawasan.

Dengan penguasaan terhadap teknologi persenjataan nuklir, ditambah dengan sikap provokatif Korut, telah memunculkan kekhawatiran bagi seluruh negara yang berkepentingan atas penciptaan stabilitas keamanan kawasan. Kemudian pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana peran AS sebagai negara hegemon, dan bagaimana skema aliansi pertahanan bilateral dengan Jepang dan Korsel yang selama menjadi “garda” terdepan mengawal stabilitas keamanan di Asia Timur dapat digunakan sebagai cara dalam menghadapi nuklir Korut.

Fenomena Uji Coba Senjata Nuklir Korut dalam Dekade Terakhir

Sejak berdiri sebagai negara merdeka, Korut telah mendeklarasikan diri secara resmi sebagai negara pemilik senjata nuklir melalui amandemen konstitusi negara (Djelantik, 2015: 3). Pemerintah Korut, melalui Menteri Pertahanan Kang So-ju, pada Februari 2010 lalu menyatakan bahwa senjata nuklir Korut digunakan untuk *self-*

defense dari ancaman hegemoni AS beserta aliansinya (Klingner, 2012: 1). Baginya, keberadaan militer AS dan beberapa negara aliansinya di kawasan merupakan sumber ancaman utama. Dengan demikian, peningkatan kapabilitas militer, termasuk di dalamnya senjata nuklir merupakan jalan yang harus ditempuh untuk tetap mempertahankan eksistensi Korut. Selain digunakan sebagai strategi *deterrence*, Korut juga menggunakan senjata nuklir sebagai *bargaining position* dalam berdiplomasi dengan dunia internasional (Mansourov, 1995: 50).

Adapun pengembangan senjata nuklir yang ditujukan untuk memproteksi diri dari ancaman hegemoni AS, justru mengantarkan ancaman tersendiri bagi stabilitas keamanan kawasan. Pilihan antara perang dan damai menjadi pertimbangan yang sulit, tidak hanya bagi Korsel, tetapi juga bagi AS (Lee, 2015: 202). Di bawah pemerintahan Obama, AS tetap berinisiatif dalam mengedepankan upaya diplomasi melalui perundingan-perundingan damai, untuk mencegah kemungkinan terburuk, yakni perang nuklir di kawasan. Hal itu berarti bahwa Korut harus tunduk di bawah kesepakatan dengan AS untuk menghentikan segala bentuk sikap

provokasi yang selama ini dilakukan. Program denuklirisasi dirasa ampuh bagi AS guna menghentikan atau setidaknya meredam agresivitas Korut. Namun begitu, pihak Korut tetap bersikeras tidak akan menghentikan pembangunan serta pengembangan senjata nuklir. Presiden Korut Kim Jong-un telah secara tegas menyatakan “menghadapi senjata nuklir harus dengan senjata nuklir” (Klingner, 2012).

Penolakan terhadap upaya denuklirisasi menjadi bukti bahwa tidak ada kompromi, khususnya untuk pembahasan tentang senjata nuklir. Kondisi seperti ini semakin mempersulit posisi AS dan Korsel guna mencari langkah konkret menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Di bawah kendali Kim Jong-un, Korut seolah semakin tidak terbendung. Program pembuatan serta uji coba roket peluncur satelit, bom hidrogen berdaya ledak 6-8 kiloton dinamit, peluncuran rudal Tai Po Dong II, serta ICBM (*Intercontinental Ballistic Missile*) menjadi target pencapaian Korut yang harus sudah terpenuhi dalam waktu dekat (Bennett, 2016). Mengandalkan fasilitas reaktor nuklir di Yongbyon, Kim Jong-un memaksa seluruh ilmuwan Korut untuk merealisasikan pengembangan roket peluncur satelit secepatnya, yang nantinya akan digunakan sebagai satelit geostasioner

untuk satelit pengawal rudal ICBM (Bennett, 2016).

The Six-Party Talks, yang merupakan forum internasional beranggotakan enam negara, yaitu AS, Rusia, China, Jepang, Korsel, dan Korut, yang dibentuk pada tahun 2003, seolah tidak berarti apapun ketika Korut meluncurkan uji coba senjata nuklir untuk pertama kalinya pada bulan Oktober 2006. Kemudian, pada bulan April 2012, Korut meluncurkan roket satelit, yang dengan ini secara jelas telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB serta moratorium rudal yang telah disepekatinya pada bulan Februari sebelumnya. Tanpa mempedulikan kecaman dunia internasional, Korut kembali melakukan uji coba nuklir ketiga yang dilakukan pada Februari 2013. Perundingan segala bentuk denuklirisasi dengan Korut dinyatakan tidak berhasil. Korut hanya akan melaksanakan program tersebut ketika seluruh negara pemilik senjata nuklir, termasuk AS dan sekutunya serta Rusia dan China, juga melakukannya (Sandreas, 2013).

Tiga tahun berselang, tepatnya pada bulan Januari 2016 lalu, Korut kembali melakukan aksi serupa dengan dengan melakukan uji coba senjata nuklir keempat. Di banyak pemberitaan yang beredar, dalam uji coba ini, Korut

belum mendapatkan hasil yang sempurna. Belum genap satu tahun, uji coba senjata nuklir kelima kembali dilakukan pada tanggal 9 September 2016 dan Kim Jong-un, yang secara langsung menyaksikan uji coba tersebut, merasa sangat puas dengan hasil yang diperlihatkan. Dilansir dari kantor berita Korsel, Yonhap, Pemerintah Korut kembali akan mempersiapkan uji coba senjata nuklirnya yang keenam dalam waktu dekat ini. Menurut keterangan yang beredar di media masa Korsel, lokasi uji coba akan dilakukan di terowongan di pegunungan yang tidak lagi dipergunakan. Analisis pertahanan Korsel, K.J. Kwon mengindikasikan bahwa jika Korut benar-benar akan melakukan uji coba senjata nuklirnya yang keenam, maka Korut sekarang telah berhasil menguasai proses pembuatan miniatur hulu ledak nuklir untuk digunakan pada rudal balistik (Hunt, Kwon, dan Hanna, 2016).

Menyikapi langkah Korut yang semakin sulit untuk dikendalikan, tidak lama setelah peristiwa tersebut, AS mengambil manuver politik dengan menerbangkan pesawat pengebom jenis B-1 miliknya tepat di atas perbatasan dengan Korut. Menanggapi kondisi tersebut, langkah diplomasi selanjutnya ditempuh dengan mendesak peran aktif China yang merupakan sekutu utama

Korut. Dengan ini, hubungan bilateral antara Beijing dan Pyongyang akan sangat diandalkan guna melakukan pendekatan diplomatis untuk menekan Korut agar segera menghentikan serangkaian uji coba nuklirnya yang telah membahayakan tidak hanya bagi stabilitas keamanan kawasan, tetapi juga bagi keselamatan lingkungan (Hardianto, 2016).

Dengan hanya berjarak satu tahun, tepatnya pada tanggal 3 September 2017, Pyongyang kembali melanjutkan program uji coba senjata nuklir keenam. Bom hidrogen berkekuatan 20-30 kilo ton, dengan hasil guncangan berkekuatan 6,3 skala Richter, diledakkan di bawah tanah dekat Kilju, Punggye-ri, di lokasi yang juga menjadi tempat uji coba senjata nuklir Korut kelima pada September 2016. Kim Jong-un mengklaim bahwa mereka telah melengkapi keberhasilan pengujian bom hidrogen, sebagai bagian dari serangkaian uji coba nuklir yang keenam. Tidak cukup dengan uji coba senjata nuklir tersebut, pada tanggal 15 September lalu, Korut kembali mengejutkan dunia internasional dengan meluncurkan *ballistic missile* yang diterbangkan dari Sunna di wilayah utara Pyongyang, kemudian melintasi wilayah udara Hokkaido, Jepang, 20 menit sebelum mendarat Samudera Pasifik

dengan jarak 2.200 km ke arah timur dari Cape Erimo (Knox dan Baker, 2017). Situasi tersebut semakin diperparah dengan pernyataan-pernyataan provokatif yang dilontarkan oleh Donald Trump dan Kim Jong-un sehingga pertanyaan yang muncul hari ini tidak terlepas dari apakah serangkaian uji coba senjata nuklir Korut tersebut akan menyulut Perang Dunia III di tengah persaingan strategis antara AS dan China (Majumdar, 2017).

Nuklir Korut: Ancaman terhadap Stabilitas Hegemoni AS

Pidato Kim Jong-un saat peringatan upacara tahun baru 2017 lalu, mengisyaratkan pesan yang tentunya sangat berpengaruh terhadap masa depan stabilitas keamanan tidak hanya bagi Asia Timur atau Pasifik, tetapi juga secara global. Kim mengatakan bahwa Korut tengah memasuki babak terakhir uji coba peluncuran ICBM. Pidato tersebut sama halnya dengan deklarasi bahwa sekarang ini Korut telah menentukan posisi sebagai negara dengan senjata nuklir, dan tidak menutup kemungkinan bahwa senjata nuklir tidak lagi sebatas *deterrence* atau *bargaining position*, tetapi juga digunakan sebagai *pre-emptive strikes* dari ancaman hegemoni AS dan sekutunya (Revere, 2017).

Deklarasi tersebut hendak menyampaikan pesan kepada AS dan aliansinya bahwa Korut dengan senjata nuklirnya sekarang ini merupakan wujud ancaman nyata. Hal tersebut seolah menegaskan langkah diplomasi koersif Pyongyang bahwa dengan senjata nuklir yang dimiliki saat ini, Korut siap jika terpaksa harus berkonfrontasi langsung dengan AS. Anggapan Trump bahwa tindakan tersebut adalah misi bunuh diri Korut sama sekali tidak berpengaruh terhadap Korut (Revere, 2017). Dengan kemampuan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa propaganda Kim untuk segera menargetkan serangan roket pada instalasi-instalasi militer AS di Asia Pasifik akan benar-benar menjadi kenyataan. Hal tersebut pada akhirnya berpotensi besar untuk memicu perang terbuka dengan AS dan sekutunya.

Dengan demikian, persenjataan nuklir secara perlahan juga bertujuan untuk “mematahkan” eksistensi hegemoni AS, khususnya di Asia Pasifik. Uji coba senjata nuklir keenam, yang dilanjutkan dengan peluncuran *ballistic missile* yang melintasi wilayah udara Hokkaido September lalu, memperlihatkan adanya indikasi pelemahan terhadap hegemoni AS yang ternyata gagal dalam menghentikan program pengembangan uji coba senjata nuklir Korut, di mana hal tersebut dapat

dijadikan sebagai tolak ukur terhadap stabilitas hegemoni AS, yang pada intinya memaksa kekuatan hegemoni untuk mampu menetapkan hukum internasional dan norma yang berupaya “menstrukturisasi” perilaku negara. Penetapan sanksi ditujukan bagi siapapun entitas yang kontraproduktif terhadap kepentingan kekuatan hegemoni (Yazid, 2015: 68).

Dengan mengesampingkan kemungkinan sanksi-sanksi tegas yang akan kembali menimpa Korut, Kim tetap bersikeras bahwa pengembangan teknologi *nuclear delivery system* merupakan upaya pengamanan terhadap integritas kedaulatan dari adanya kemungkinan invasi AS dan sekutunya. Di samping itu, Kim juga mengancam akan menjadikan pangkalan dan fasilitas militer AS di Guam sebagai target serangan rudal Korut selanjutnya. Kim menegaskan bahwa Guam yang hanya berjarak 2.100 mil masih berada dalam jarak jangkauan rudal menengah Korut yang mampu menempuh jarak hingga 2.700-3.000 mil. Di dalamnya, Guam menganut *forward base joint installation system* yang mengkombinasikan instalasi persenjataan Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS yang didukung dengan skuadron kapal selam dan fasilitas *nuclear delivery system*. Tidak hanya itu, AS juga menempatkan 6.000

personil militer yang seluruhnya mampu melakukan *Special Operations Forces* yang mendukung peluncuran serta penerbangan untuk melakukan serangan ke daerah-daerah strategis dan berotasi di sekitar wilayah Jepang dan Semenanjung Korea (Horton, 2017).

Korut menyadari bahwa gelar pasukan di Guam menjadi titik sentral bagi geostrategi AS, di mana selama ini Guam digunakan sebagai akses kendali dalam mengontrol dan menjaga eksistensi militer AS di kawasan Asia Pasifik. Namun, untuk sekarang ini, ancaman nuklir Korut tampaknya tidak lagi sekedar provokasi. Hal ini dibenarkan oleh *Pentagon's Defense Intelligence Agency* (DIA), berkaca dari uji coba rudal baru-baru ini yang menunjukkan kemajuan teknis yang mengejutkan oleh ilmuwan senjata negara tersebut, di mana hal tersebut diluar perkiraan Korut sebagai negara komunis yang terisolasi (Nakashima, Fifield, dan Warrick, 2017). Adapun *East Asian Intelligence Officials* (EAIO) menambahkan bahwa Korut akan mampu meluncurkan ICBM, tepatnya di awal tahun 2018. Hal ini lebih cepat satu tahun dari perkiraan sebelumnya. EAIO menyatakan bahwa proses program nuklir negara tersebut baru sampai pada tahap *prototype* dan mengarah pada model perakitan, untuk kemudian siap

digunakan sebagai senjata berdaya jangkau lintas benua. Adapun pengaruhnya terhadap senjata nuklir tersebut secara dramatis akan meningkatkan krisis semenanjung Korea, di mana kawasan Asia Pasifik berada pada resiko miscalculation yang sangat tinggi. Kondisi tersebut akan memaksa hegemoni AS untuk tidak mengambil langkah yang justru akan semakin memperburuk keadaan (Berkowitz, Karklis, dan Meko, 2017).

Polemik Sanksi Ekonomi AS terhadap Korut

Sanksi ekonomi terhadap Korut menjadi tantangan serius bagi stabilitas hegemoni. Fenomena tersebut tentu menempati prioritas tertinggi dalam agenda politik global AS. Dengan mengingat ancaman yang akan ditimbulkan, tujuan yang hendak dicapai oleh AS adalah untuk melumpuhkan seluruh senjata nuklir serta sistem pendukung lainnya, seperti instalasi, fasilitas berupa reaktor nuklir, dan jenis material lainnya yang mendukung. Kemudian, pilihan sanksi terhadap Korut merupakan langkah utama yang menjadi simbol kekuatan hegemoni AS. Sanksi ekonomi terhadap Korut ditetapkan oleh Pemerintah AS pada tanggal 21 September 2017. Sanksi tersebut ditetapkan dengan mengeluarkan

perintah eksekutif untuk menutup segala bentuk akses keuangan AS kepada Korut. Departemen Keuangan AS juga menutup segala bentuk transaksi keuangan dengan jaringan bisnis dan perdagangan di mana terdapat keterlibatan Korut di dalamnya. Washington juga menekan Beijing untuk segera memperingatkan seluruh aset perbankan yang dimilikinya untuk menghentikan pemberian layanan keuangan dan kerja sama ekonomi dalam bentuk apapun kepada Korut (Snyder, 2017).

Sanksi ekonomi AS terhadap Korut menuntut keterlibatan China yang selama ini menjadi “tumpuan” diplomasi Pyongyang. Dalam beberapa kesempatan, Kim Jong-un melakukan pendekatan kepada China guna memohon keringanan atas sanksi berupa embargo ekonomi yang semakin mengucilkan Korut dari dunia internasional pada 2013 lalu. Melalui sanksi yang diberikan, Trump berharap bahwa China perlu membuat “perhitungan” politik agar tidak bisa selamanya mempertahankan dukungannya terhadap manuver politik Korut, perlunya mengambil sikap termasuk memberikan sanksi tegas kepada Korut. Hal tersebut dapat dipahami karena selama ini China menjadi mitra dagang terbesar Korut dalam hal energi, pangan,

hingga bantuan ekonomi dan militer. Melalui sanksi ekonomi, Washington hendak memberikan peringatan bahwa China harus mengambil langkah tegas dengan segera menarik dukungannya terhadap Korut tanpa syarat (Deutch dan Samore, 2017).

AS mendorong China untuk peduli terhadap konsekuensi berbahaya yang ditimbulkan dari program nuklir Korut terhadap stabilitas keamanan kawasan. Menyelaraskan AS dan China guna menekan Korut untuk tunduk di bawah *status quo*, yang berarti “menghapus” senjata nuklir dari semenanjung Korea, tentunya bukanlah perkara yang mudah. Pertarungan kepentingan antara AS dan China terkait penciptaan stabilitas keamanan kawasan telah sangat berpengaruh terhadap tatanan kawasan Asia Pasifik dewasa ini. Namun, di tengah persaingan strategis yang tengah berlangsung, kebutuhan akan terciptanya *strategic partnership* antara AS dan China dalam isu nuklir Korut tetap menjadi prioritas utama. Hal tersebut dibuktikan ketika Trump menyatakan bahwa China menjadi entitas yang berpengaruh bagi Korut, terutama dalam merealisasikan sanksi ekonomi. AS memahami bahwa tidak ada negara yang sangat berpengaruh terhadap Korut selain China. China-Korut telah memiliki kerja sama

pertahanan sejak 56 tahun lalu. Selain itu, hampir 90% total perdagangan Korut beroperasi di China (Friedman, 2017).

Sebagai mitra ekonomi terbesar Korut, China menjadi kunci keberhasilan bagi sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh AS. Dengan ini, Washington mendesak China untuk tidak lagi menerapkan standar ganda sebagaimana ketika China mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB terkait program nuklir Korea Utara, namun pada saat yang sama, China tetap menjadi andalan Korut saat bertahan dari sanksi pengucilan serta embargo ekonomi dan perdagangan dari dunia internasional pasca uji coba senjata nuklir Korut pertama tahun 2006. Dukungan China tersebut juga didorong oleh kepentingan nasional, di mana perekonomian di wilayah perbatasan terluar China sangat terpengaruhi oleh perubahan situasi di Korea Utara. Pemerintah daerah di sekitar perbatasan dengan Korut tetap menghendaki terjalinnya kerja sama ekonomi secara berkelanjutan. Akan tetapi, di saat yang sama, China juga menyadari bahwa kondisi geopolitik yang tercipta akibat senjata nuklir Korut terus mendesak China untuk menghentikan bentuk kerja sama ekonomi apapun dengan Korut secara total, tidak terkecuali dengan sanksi ekonomi AS terhadap Korut

belakangan ini (Fei dan Saalman, 2017: 22).

Banyak pakar China berpendapat bahwa keterlibatan ekonomi adalah satu-satunya langkah diplomatik yang tepat guna menghentikan provokasi Korea Utara dan meredam reaksi keras dunia internasional mengenai upaya denuklirisasi. Selanjutnya, reformasi pertanian dan industrialisasi Korut merupakan sinyal positif yang diperkirakan akan berdampak baik di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu di Asia Timur. Namun, bagi negara-negara yang mengambil sikap koersif terhadap isu nuklir Korut, keterlibatan ekonomi China dipandang sebagai jaminan ditengah derasnya pengucilan dunia internasional terhadap Korut (Fei dan Saalman, 2017: 22). Dengan demikian, pernyataan tegas Trump kepada China untuk berperan aktif dalam menghentikan program pengembangan nuklir Korut, termasuk pemberian sanksi ekonomi tentu bertolak belakang dengan kepentingan nasional China. Dalam kesempatan lain, China, melalui Menteri Luar Negeri Wang Yi, menegaskan bahwa denuklirisasi juga merupakan bentuk provokasi. Denuklirisasi bagi China bukanlah sebuah cara yang seharusnya ditempuh, namun lebih kepada tujuan akhir. Dengan demikian, logis jika Korut juga

memandang bahwa apa yang selama ini dikampanyekan oleh AS, sama halnya dengan sebuah ancaman, justru mendorong Korut untuk lebih bersikap konfrontatif (Fei dan Saalman, 2017).

Dengan demikian, kunci keberhasilan sanksi ekonomi yang diusung oleh Washington terhadap Pyongyang terletak di tangan Beijing. AS menyadari bahwa dengan volume perdagangan Korut di China yang totalnya mencapai 90%, ditambah keuntungan perdagangan yang mencapai US\$ 2,6 miliar di tahun 2016, sanksi ekonomi AS tidak berarti apapun bagi Korut jika China tetap tidak menarik bantuan ekonominya tersebut (Albert, 2017). Hal ini menjadi menarik ketika melihat polemik yang terjadi antara AS dan China mengenai sanksi ekonomi terhadap Korut adalah sebagai balasan atas uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korut. Sanksi tersebut tentunya bertolak belakang dengan kepentingan China yang selama ini diwujudkan melalui bantuan ekonomi maupun militer kepada Korut. Sebagai negara hegemon, AS menyadari bahwa nuklir Korut juga merupakan kepanjangan tangan dari China. Namun, sanksi ekonomi tersebut mempertegas politik global AS bahwa kapabilitas nuklir Korut bukanlah tidak mungkin merugikan siapapun yang

berkepentingan atas stabilitas keamanan kawasan, termasuk China.

Trilateralisme: Reformasi Paradigma Aliansi Pertahanan AS-Jepang-Korsel Menghadapi Nuklir Korut

Pasca Perang Dunia II, intervensi AS dalam struktur keamanan Asia Timur dibangun melalui strategi pertahanan bilateral dengan Jepang dan Korea Selatan, yang kemudian disepakati melalui *bilateral defense alliance*. Di bawah kesepakatan tersebut, AS memosisikan diri sebagai pemain utama, di mana fokus terhadap keamanan Asia Timur atau Pasifik Barat juga merupakan perwujudan dari keamanan nasional AS. Dengan pendekatan yang tidak jauh berbeda baik terhadap Jepang maupun Korsel, AS tetap menggarisbawahi bahwa hingga 50 tahun terakhir ini ancaman tetap tidak bergeser dari Korut. Sejauh ini, Korsel berada di garda terdepan dalam perlawanan terhadap Korut, di mana konflik warisan Perang Dingin tersebut menarik banyak perhatian dunia internasional ketika mekanisme diplomasi multilateral yang tertuang dalam *Six-Party Talks* pada akhirnya juga tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam melakukan denuklirisasi terhadap Korut (Calder, 2013). Kondisi tersebut tentunya

menghadirkan dilema tersendiri bagi Korsel, Jepang, bahkan AS ketika tatanan keamanan kawasan harus berhadapan dengan senjata nuklir Korut.

Fenomena tersebut pada akhirnya menuntut sebuah pengkajian ulang yang sangat mendasar bagi struktur keamanan di Asia Timur. Hal tersebut menggambarkan bahwa strategi pertahanan bilateral dianggap sudah tidak lagi relevan dalam menghadapi perkembangan ancaman yang semakin kompleks. Dengan demikian, nuklir Korut seolah memaksa AS dan sekutunya guna mengupayakan formulasi strategi baru dengan mengedepankan paradigma trilateralisme menjadi sebuah mekanisme yang efektif dalam menyatukan AS, Jepang, dan Korsel. Tercatat hampir selama 20 tahun terakhir, karakteristik ancaman yang berkembang di kawasan juga tidak terlepas dari peran penting China yang merupakan mitra strategis utama Korut. Dengan adanya keterlibatan China, konflik semenanjung Korea dewasa ini tidak lagi sebatas konflik internal. Hal tersebut karena fenomena nuklir Korut dan keterlibatan China di dalamnya juga bertujuan untuk melakukan *balancing* serta upaya pelemahan terhadap hegemoni AS.

Bantuan militer China secara tersembunyi juga memfasilitasi

teknologi pengembangan nuklir Korut yang memanfaatkan berbagai bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebutlah yang menjadi alasan penting mengapa transformasi paradigma menuju trilateralisme dibutuhkan sebagai landasan yang dapat mengakomodasi kerja sama pertahanan menyeluruh bagi AS, Jepang, dan Korsel. Melalui berbagai bentuk integrasi, reformasi aliansi bilateral menuju trilateral nantinya akan mencakup berbagai peningkatan kemampuan pertahanan ketiga negara tersebut (Park, 2015: 36). Berbagai program kerja sama pertahanan, baik dalam bentuk *joint military exercise*, *joint patrol*, maupun *military assistance* akan diperluas dengan instrumen-instrumen baru seperti *cyber war* dan teknologi intelijen yang nantinya tidak hanya berguna untuk melacak informasi terkini mengenai perkembangan senjata nuklir, tetapi juga dapat meretas situs atau berbagai sistem komputerisasi yang dipergunakan Korut untuk mengaktifkan persenjataan nuklir. Posisi strategis Jepang dan Korsel memberikan kemudahan bagi AS, di mana Trump telah menyatakan bahwa *cyber attack* akan menjadi cara yang selanjutnya dikembangkan AS guna menghentikan nuklir Korut (Osborne, 2017).

Model aliansi pertahanan tersebut merupakan bentuk transformasi dari agenda trilateral sebelumnya yang tertuang dalam *Nuclear Security Summit* (NSS) yang digelar di Washington pada tahun 2016. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Presiden Barack Obama, Perdana Menteri Shinzo Abe, dan Presiden Korsel Park Geun-hye. Obama mencatat bahwa ketiga kepala pemerintahan tersebut sepakat bahwa “kerja sama keamanan trilateral sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Timur”. Tujuan utama pertemuan tersebut adalah merumuskan sebuah kebijakan keamanan bersama untuk menanggulangi serta mencegah potensi proliferasi nuklir yang dilakukan oleh Korut. Pertemuan tiga negara yang diselenggarakan setiap tahun ini pastinya mengarah pada sebuah *prototype* khusus mengenai cara mengantisipasi ancaman nuklir Korut (Panda, 2016). Keberadaan NSS menjadi “modal” kekuatan diplomasi bagi ketiga negara tersebut walaupun belum memberikan dampak yang berarti bagi Korut secara signifikan. Buktinya, Korut masih leluasa melakukan uji coba nuklir keempat pada September 2016 lalu.

Di bawah “payung” aliansi pertahanan trilateral, sistem *tracking* data dan informasi pun akan diperkuat

hingga menargetkan sistem perbankan Korut, di mana AS akan mudah melacak berbagai bentuk bantuan ekonomi dan transaksi Korut dengan negara pendukungnya, seperti China dan Rusia. Upaya tersebut tentunya akan melengkapi strategi sebelumnya yang dibangun melalui kesepakatan *sharing intelligence pact*. Akan tetapi, kesepakatan tersebut masih sebatas memfasilitasi ketiga negara guna memudahkan transfer data intelijen dan informasi mengenai perkembangan terkini tentang senjata nuklir Korut. Melalui penguatan aliansi pertahanan trilateral, *sharing intelligence pact* akan bersinergi langsung dengan instalasi militer dan sistem pertahanan bersama yang diberlakukan oleh ketiga negara tersebut (Panda, 2014). Mengingat situasi politik dalam negeri Korut tidak hanya berdampak pada keamanan Jepang dan Korsel, melalui mekanisme aliansi trilateral tersebut, AS memberikan peran lebih kepada Jepang dan Korsel. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat pengaruh Jepang dan Korsel di kawasan, di samping menjalankan fungsi sebagai pihak yang berkepentingan atas keamanan di Asia Timur (Saunders, 2012: 23).

Di samping mendapatkan “*security umbrella*” dari AS, militer Jepang dan Korsel memperluas

pengaruhnya melalui keikutsertaan dalam upaya keamanan multilateral yang meliputi bidang keamanan maritim dan pertahanan udara. Mekanisme aliansi trilateral menyelaraskan serta melengkapi sikap AS di berbagai isu-isu diplomatik yang berkembang, terutama mengenai *freedom of navigation* di Laut China Selatan, serta tumpang tindih klaim *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) dengan China (Calder, 2013). Secara praktik, reformasi model aliansi tersebut mendorong perluasan cakupan “skenario” yang lebih luas ketika AS menyadari bahwa bentuk strategi *deterrence* dan *military containment* tidak sepenuhnya efektif dalam menghadapi senjata nuklir Korut. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman dunia internasional bahwa ada keterlibatan China dalam pengembangan senjata nuklir Korut. Dengan demikian, mekanisme aliansi trilateral dibuat dalam bentuk kerja sama yang menyeluruh. Kemudian, penyelarasan terhadap sebuah isu tertentu, khususnya nuklir Korut, dibangun hingga pada level pengambilan kebijakan, di mana baik AS, Jepang, maupun Korsel juga harus merumuskan strategi kebijakan yang tepat guna meredam faktor eksternal dalam peningkatan kapabilitas teknologi persenjataan nuklir Korut, yaitu China (Wicker, 2016).

Di samping itu, melalui aliansinya (Jepang dan Korsel), AS hendak membangun kewaspadaan terhadap strategi *proxy war* China yang menjadi manuver politik China melalui keterlibatannya dalam senjata nuklir Korut. Kerja sama pertahanan yang lebih teraktualisasi secara komprehensif di bawah paradigma trilateral selanjutnya juga mempengaruhi pembentukan kembali tatanan keamanan kawasan. Hal tersebut mendorong dunia internasional mendesak China untuk segera menghentikan bantuan serta keterlibatannya di Korut yang selama ini dilakukan sebagai alih teknologi program pengembangan nuklir. Adapun *strategic partnership* dengan Korut merupakan kepentingan China, di mana hal tersebut menjadi *bargaining position* terhadap dunia internasional yang selama ini menyuarakan denuklirisasi Korut. Dengan demikian, AS mengisyaratkan bahwa aliansi pertahanan trilateral ini selanjutnya hendak ditujukan untuk membangun tatanan keamanan kawasan, di mana selain menyelesaikan isu nuklir Korut, juga menyasar kepada geostrategi serta upaya perluasan pengaruh China, baik di level kawasan maupun global.

Kesimpulan

Kemampuan nuklir telah menjadi instrumen penting rezim Korea Utara

untuk bertahan hidup, sebagai prestise politik dan militer, hingga melakukan diplomasi koersif. Sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 2006, uji coba senjata nuklir telah menempuh beberapa fase pengembangan. Rezim Kim Jong-un telah menegaskan kembali bahwa senjata nuklir merupakan alat *bargaining power* yang dapat diandalkan Korut sebagai *self-defense* dan memposisikan diri di tengah ancaman hegemoni AS dan negara sekutunya di kawasan. Pernyataan resmi Kim Jong-un saat perhelatan tahun baru 2015 di Pyongyang secara terbuka menegaskan kepada dunia internasional bahwa saat ini Korut merupakan salah satu negara dengan kepemilikan senjata nuklir. Presiden Korut tersebut juga secara yakin menyatakan bahwa pada tahun 2018, Korut telah berhasil menguasai teknologi *long-range nuclear delivery system* yang nantinya digunakan untuk penembakan ICBM.

Menindaklanjuti uji coba senjata nuklir keenam Korut yang dilanjutkan dengan peluncuran *ballistic missile* yang melintasi wilayah udara Hokkaido pada September lalu, AS dan sekutunya (Jepang dan Korsel) memprotes tindakan tersebut. Kekhawatiran juga dirasakan oleh AS, di mana Kim menegaskan bahwa Guam yang hanya berjarak 2.100 mil berada pada jangkauan rudal Korut

yang mampu menempuh jarak hingga 2.700-3.000 mil. Kemudian, sanksi ekonomi diberlakukan oleh Trump kepada Korut melalui perintah eksekutif untuk menutup segala bentuk akses keuangan serta embargo ekonomi kepada Korut. Usulan Trump tersebut tentu tidak semata-mata diterima dan dijalankan oleh China yang selama ini menjadi mitra strategis utama Korut dan “tumpuan” diplomasi Pyongyang.

China telah memfasilitasi berbagai bentuk bantuan berupa energi, pangan, hingga bantuan ekonomi dan persenjataan militer Korut. Pertarungan kepentingan antara AS dan China bukan pertama kalinya menjadi polemik ketika diberlakukan sanksi terhadap Korut. Dengan adanya keterlibatan China tersebut, AS langsung mengukung aliansi pertahanan trilateral bersama Jepang dan Korsel.

Restrukturisasi tatanan keamanan kawasan melalui reformasi paradigma trilateralisme direncanakan guna mengubah mekanisme, konsep, dan pola kerja sama pertahanan tiga negara yang sebelumnya diwujudkan melalui aliansi pertahanan bilateral. Mekanisme kerja sama dibuat lebih fleksibel dan integratif dengan memperluas penanganan terhadap isu-isu yang kemudian akan melalui *cyber attack* dan kerja sama intelijen guna melengkapi program

sebelumnya dalam bentuk *joint military exercise*, *joint patrol*, dan *military assistance*. Selebihnya, ketiga negara tersebut sepakat menyatukan visi, pandangan, dan kepentingan yang sama terhadap berbagai isu diplomatic, terutama mengenai *freedom of navigation* di Laut China Selatan dan tumpang tindih klaim terhadap *Air Defense Identification Zone (ADIZ)* antara Jepang dan China.

Bentuk strategi *proxy war* China melalui dukungannya terhadap nuklir Korut merupakan bentuk ancaman terhadap hegemoni AS. Aliansi pertahanan trilateral mensyaratkan upaya berkelanjutan guna menghadapi China yang menjadikan isu nuklir Korut sebagai alasan utama mengenai proses pelemahan terhadap hegemoni AS. Aliansi pertahanan trilateral juga berupaya menelaah lebih jauh bahwa untuk menghadapi nuklir Korut juga dibutuhkan pembahasan mengenai geostrategi dan perluasan pengaruh China sebagai *The Rising Power of Asia*. Dengan demikian, pembangunan paradigma kerja sama yang komprehensif bagi pemenuhan kepentingan keamanan AS, Jepang, dan Korsel merupakan “roh” utama yang digunakan ketika AS menyadari bahwa isu nuklir Korut bukanlah fenomena

yang berdiri sendiri dan membutuhkan model aliansi pertahanan trilateral.

Daftar Pustaka

Buku

Djelantik, Sukawarsini (ed.). *Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Fei, Su dan Lora Saalman. *China's Engagement of North Korea: Challenges and Opportunities for Europe*. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, 2017.

Lee, Kyung Hyung. "Konflik di Semenanjung Korea: Solusi Damai atas Kepemilikan Nuklir Korea Utara" dalam Djelantik, Sukawarsini (ed.). *Asia-Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Park, Chang-kwoun. *Rethinking North Korea's Denuclearization: Approaches and Strategies*. Stockholm: Institute for Security and Development Policy, 2015.

Jurnal

Klingner, Bruce. "Deny, Deceive, and Delay: North Korea's Nuclear Negotiating Strategy". *The*

Journal of East Asian Affairs, Vol. 26, No. 2 (Fall/Winter 2012), hal. 1-24.

Mansourov, Alexandre Y. "The Origins, Evolution, and Current Politics of the North Korean Nuclear Program". *The Nonproliferation Review* (Spring/Summer 1995).

Yazid, Mohd. Noor Mat. "The Theory of Hegemonic Stability, Hegemonic Power and International Political Economic Stability". *Global Journal of Political Science and Administration*, Vol. 3, No. 6 (Desember 2015), hal. 67-79.

Dokumen Lain

Habib, Benjamin. "The Six Party Talks and Institutional Security in Northeast Asia: A Grim Forecast". *Paper presented at the 18th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia* (5-8 Juli 2010).

Revere, Evans J.R. "2017: Year of Decision on the Korean Peninsula". *Paper presented at the 5th Korea Research Institute for National Strategy-Brookings Institution Joint Conference on "The Trump Administration in the United States and the Future of East Asia and the Korean Peninsula"* (8 Februari 2017).

Saunders, Paul J. "Extended Deterrence and Security in East Asia: A U.S.-Japan-South Korea Dialogue". *Center for the National Interest* (2012).

Internet

Albert, Eleanor. "The China-North Korea Relationship". *Council on Foreign Relations*, 27 September 2017.

<https://www.cfr.org/backgrounders/china-north-korea-relationship> (diakses pada tanggal 30 September 2017).

Bennett, Bruce. "Apa yang Harus Diperhatikan dari Uji Coba Nuklir Korea Utara?". *BBC Indonesia*, 9 September 2016. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160909_dunia_korut_nuklir_analisis (diakses pada tanggal 24 September 2016).

Berkowitz, Bonnie, Laris Karklis, dan Tim Meko. "What is North Korea Trying to Hit?". *The Washington Post*, 25 Juli 2017. https://www.washingtonpost.com/graphics/world/north-korea-targets/?utm_term=.813605ddf5 (diakses pada tanggal 10 Agustus 2017).

Calder, Kent. "The Strategic US-Japan-Korea Triangle: Emerging Perils

and Prospects for Cooperation". *Nippon.com*, 24 Desember 2013. <https://www.nippon.com/en/in-depth/a02702/> (diakses pada tanggal 26 September 2016).

Deutch, John dan Gary Samore. "How America Can Thwart North Korea's Nuclear Threat". *The National Interest*, 31 Mei 2017. <http://nationalinterest.org/feature/how-america-can-thwart-north-koreas-nuclear-threat-20934?page=show> (diakses pada tanggal 30 September 2017).

Friedman, Uri. "Why China isn't Doing More to Stop North Korea". *The Atlantic*, 9 Agustus 2017. <https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/08/north-korea-the-china-options/535440/> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2017).

Hardianto, B. Josie Susilo. "Terkait Nuklir Korea Utara, AS Dorong Tiongkok Berbuat Lebih". *Kompas*, 6 September 2016. <http://print.kompas.com/baca/internasional/asia-pasifik/2016/01/08/Terkait-Nuklir-Korea-Utara%2c-AS-Dorong-Tiongkok-Berbuat-Lebih> (diakses pada tanggal 6 September 2016).

- Horton, Alex. "Why North Korea Threatened Guam, the Tiny U.S. Territory with Big Military Power". *The Washington Post*, 9 Agustus 2017. <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/08/09/why-north-korea-threatened-guam-the-tiny-u-s-territory-with-big-military-power/> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2017).
- Hunt, Katie, K.J. Kwon, dan Jason Hanna. "North Korea Claims Successful Test of Nuclear Warhead". *CNN*, 10 September 2016. <http://edition.cnn.com/2016/09/08/asia/north-korea-seismic-activity/> (diakses pada tanggal 27 September 2016).
- Knox, Patrick dan Neal Baker. "Could World War 3 Happen? How North Korea Nuclear Tests and Missile Launches Could Lead to Global Military Conflict". *The Sun News*, 2 Oktober 2017. <https://www.thesun.co.uk/news/2070034/world-war-3-nuclear-north-korea-kim-jong-un-donald-trump-latest/> (diakses pada tanggal 3 Oktober 2017).
- Majumdar, Dave. "A North Korean Nuclear Weapons Test in the Pacific Ocean: An Act of War?". *The National Interest*, 26 September 2017. <http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/north-korean-nuclear-weapons-test-the-pacific-ocean-act-war-22484> (diakses pada tanggal 30 September 2017).
- McCurry, Justin. "North Korea Accused of 'Maniacal Recklessness' after Nuclear Test Triggers Earthquake". *The Guardian*, 10 September 2016. <https://www.theguardian.com/world/2016/sep/09/north-korea-nuclear-test-earthquake> (diakses pada tanggal 26 September 2016).
- Nakashima, Ellen, Anna Fifield, dan Joby Warrick. "North Korea Could Cross ICBM Threshold Next Year, U.S. Officials Warn in New Assessment". *The Washington Post*, 25 Juli 2017. https://www.washingtonpost.com/world/national-security/north-korea-could-cross-icbm-threshold-next-year-us-officials-warn-in-new-assessment/2017/07/25/4107dc4a-70af-11e7-8f39-eeb7d3a2d304_story.html (diakses pada tanggal 10 Agustus 2017).

- Osborne, Simon. "Donald Trump 'Ordered Hackers to Launch Cyber-warfare' Against North Korea". *Express.co.uk*, 4 Oktober 2017. <http://www.express.co.uk/news/world/862289/world-war-3-donald-trump-ordered-cyber-attacks-against-north-korea-spy-agency> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2017).
- Padden, Brian. "Tolak Perjanjian Nuklir, Korea Utara Andalkan China untuk Longgarkan Sanksi". *VOA Indonesia*, 30 Juli 2015. <http://www.voaindonesia.com/a/kurut-tolak-perjanjian-nuklir-seperti-iran-/2884397.html> (diakses pada tanggal 23 September 2016).
- Panda, Ankit. "On Nuclear Summit Sidelines, US, South Korea, and Japan Stand Against North Korea". *The Diplomat*, 1 April 2016. <https://thediplomat.com/2016/04/on-nuclear-summit-sidelines-us-south-korea-and-japan-stand-against-north-korea/> (diakses pada tanggal 26 September 2016).
- Panda, Ankit. "US, South Korea, Japan Start Sharing Intelligence on North Korea". *The Diplomat*, 30 Desember 2014. <https://thediplomat.com/2014/12/us-south-korea-japan-start-sharing-intelligence-on-north-korea/> (diakses pada tanggal 26 September 2016).
- Rizal. "Korea Utara Baru Pamer Nuklir, AS Jawab dengan Pesawat Pengebom". *IDN Times*, 14 September 2016. <https://news.idntimes.com/world/rizal/korea-utara-baru-pamer-nuklir-as-jawab-dengan-pesawat-pengebom> (diakses pada tanggal 26 September 2016).
- Sandreos, Jakichi. "North Korea Following Old Pattern of Warning, Threats and Provocation". *The Hankyoreh News*, 9 Mei 2013. <http://www.hani.co.kr/anti/ENGISSUE/102577004.HTML> (diakses pada tanggal 27 September 2016).
- Snyder, Scott. "The U.S. Treasury's 'Nuclear Option' in Response to North Korea's Nuclear Threat". *Forbes*. 25 September 2017. <https://www.forbes.com/sites/scottsnider/2017/09/25/the-u-s-treasurys-nuclear-option-in-response-to-north-koreas-nuclear-threat/#5a24f4b03438>

(diakses pada tanggal 27
September 2016).

Wicker, McDaniel. "America's Next
Move in Asia: A Japan-South
Korea Alliance". *The National
Interest*, 24 Februari 2016.
[http://nationalinterest.org/feature/
americas-next-move-asia-japan-
south-korea-alliance-15301](http://nationalinterest.org/feature/americas-next-move-asia-japan-south-korea-alliance-15301)

(diakses pada tanggal 30
September 2017).